

MENCERMATI PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT MINANGKABAU MELALUI NOVEL *TAMU* KARYA WISRAN HADI

*Siti Fatimah**

ABSTRACT

This study discusses changes in the value system in West Sumatera, especially those in the relationship between *mamak* and nephew in the matrilineal kinship system of the Minangkabau people, as portrayed in Wisran Hadi's novel *Tamu*. The findings of this research show that there are parallel occurrences between *Tamu* and the condition of the Minangkabau people who are experiencing changes in the value system, especially in terms of the role of *mamak* in West Sumatera. The setting of *Tamu* is during the New Order around the 1990s. Political factors, i.e. development policies, during the New Order have contributed to the changes in this value system.

Kata kunci : pergeseran, sistem nilai, matrilineal

PENGANTAR

Sebagai seorang pengarang, nama Wisran Hadi sudah tidak asing lagi bagi dunia sastra Indonesia. Pelukis yang kemudian menggeluti bidang sastra ini telah berkali-kali mendapatkan penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta. Lebih dari sepuluh karya naskah dramanya terpilih sebagai pemenang dalam sayembara penulisan naskah drama yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta.

Selain naskah drama, cerpen dan novel juga diciptakan oleh Wisran. Karya sastranya dikenal sangat kental warna kedaerahannya dan tulisannya banyak mengangkat cerita-cerita rakyat dan mitos dari Minangkabau. Wisran tidak begitu mahir dalam menulis cerita-cerita fiksi. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk mengangkat fenomena sosial yang ada di sekeliling kehidupannya sehingga dapat dicermati mengapa karya Wisran Hadi

sangat dekat dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.

Tamu yang pernah dimuat sebagai cerita bersambung di harian *Republika* mengangkat keadaan masyarakat Minangkabau yang sedang mengalami proses pergeseran sistem nilai kekerabatan matrilineal, khususnya peran *mamak* (saudara laki-laki ibu) dalam kelompok keluarga luas (*extended family*). Berawal dari dirinya yang sangat tertekan dengan terbunuhnya seorang anggota kaum dan konflik yang terjadi bertahun-tahun dalam keluarga luasnya telah membuat batinnya gelisah. Mereka mempercayakan penyelesaian konflik tersebut kepadanya karena dialah yang dianggap pantas dan mampu mengatasi berbagai persoalan itu dipandang dari garis keturunan maupun kemampuan.

Pergeseran sistem nilai telah mengguncangkan tatanan sosial dalam masyarakat dan

* Staf pengajar Fakultas Sastra, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

mengakibatkan bergesernya peran *mamak* dalam keluarga. Keadaan itu terjadi selain karena kontak dengan dunia luar, juga karena kebijakan politik pada zaman Orde Baru. Dalam *Tamu* pergeseran nilai itu terlukis antara lain ketika jabatan kepala kaum sudah tidak menarik lagi, kemerosotan moral dalam keluarga, kebebasan sex, perebutan *tanah pusako*, dan berubahnya fungsi surau dalam kaum. Surau kaum yang tergusur oleh pembangunan masjid telah menggeser fungsi surau yang sangat vital bagi kehidupan kaum karena tidak ada lagi tempat untuk mendidik anak-anak menuju kedewasaan. Selain surau, pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat juga telah menggusur rumah, gadang bahkan tanah pekuburan. Keadaan inilah yang menyebabkan seorang *mamak* memilih tinggal di luar rumah gadang dan menerima tamu-tamunya di rumah istrinya tersebut. Hal ini terasa janggal karena seorang *mamak* biasanya akan menerima tamu dan membicarakan persoalan keluarga di rumah gadangnya.

Pergeseran sistem nilai, terutama perubahan peran *mamak* dalam keluarga Minangkabau, dapat dicermati dalam novel *Tamu* karya Wisran Hadi dan sejumlah referensi atau daftar pustaka. Karya-karya itu dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra.

Pendekatan sosiologi sastra dilakukan karena karya sastra mempunyai fungsi yang sama dengan aspek kebudayaan yang lain yang harus dipahami sebagai bagian dari sistem komunikasi secara keseluruhan dalam masyarakat. Karya sastra tidak dapat dipisahkan dari gagasan masyarakat tempat karya sastra itu lahir (Yunus, 1986:2). Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Wolf (1981:1) bahwa sastra adalah produk sosial budaya, sedangkan Teeuw (1980:11) mengatakan karya sastra hanya dapat dipahami secara lengkap apabila diketahui latar belakang sosial budaya masyarakat yang menghasilkannya. Sejalan dengan pernyataan itu, Harry Levin (dalam Elizabeth dan Burns, 1973:31) juga

berpendapat hubungan antara sastra dan masyarakat bersifat timbal balik. Karya sastra hadir bukan hanya karena efek dari masyarakat, tetapi sastra juga hadir karena sebab dari masyarakat. Dengan demikian, karya sastra tidak dapat lepas dari kenyataan sosial dan sosiologi sastra merupakan alat yang tepat untuk mengungkapkan makna karya sastra.

Penelitian karya sastra dengan pendekatan sosiologi sastra dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu sosiologi pengarang yang membicarakan pengarang sebagai penghasil karya sastra, isi karya sastra sebagai cermin masyarakat dan dari sisi pembaca yaitu fungsi sosial sastra (Wellek dan Warren, 1993:111; Yunus, 1986:1; Abrams, 1981:178). Dengan demikian, novel *Tamu* sebagai cermin kehidupan masyarakat dianalisis melalui pendekatan sosiologi sastra yang memokuskan pada pergeseran sistem nilai dengan teori Goldmann, yaitu teori stukturalisme genetik.

HUBUNGAN TAMU DENGAN MASYARAKAT MINANGKABAU

Pengarang karya sastra akan melahirkan karyanya yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Seperti yang dikatakan oleh Wolf (1981:1), seni (termasuk karya sastra) adalah produk sosial. Ini berarti masyarakat ikut berperan dalam penciptaan karya sastra. Begitu juga novel *Tamu* yang lahir dari sastrawan Minangkabau: Wisran Hadi. Hubungan timbal balik antara novel *Tamu*, Wisran Hadi, dan masyarakat Minangkabau tidak dapat dihindari karena ketiganya merupakan kesatuan yang berproses secara bersama dalam melahirkan *Tamu*.

Pengarang sebagai anggota masyarakat tidak lepas dari kondisi lingkungan masyarakat. Dengan sendirinya, lingkungan masyarakat itu akan memengaruhi pemikiran maupun pandangan pengarang. Goldmann (1981:112) mengatakan bahwa pandangan dunia yang berupa gagasan, aspirasi dan perasaan dari kelompok sosial tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses waktu yang panjang

karena pandangan dunia merupakan produk interaksi antara subjek kolektif dengan alam sekitarnya. Dengan demikian, novel *Tamu* merupakan gagasan penulis yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. *Tamu* merupakan karya sastra yang mengangkat permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu pergeseran sistem nilai di Minangkabau. Tidak dapat disangkal bahwa ketika masyarakat Minangkabau mengalami proses perubahan sistem nilai, perubahan yang tidak dapat dihindari itu tercermin juga dalam *Tamu*. Pergeseran sistem nilai seperti yang terlukis dalam *Tamu* merupakan bagian kehidupan dari masyarakat Minangkabau dan tidak hanya terjadi dalam kisah novel saja sehingga pergeseran sistem nilai itu memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat Minangkabau.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau terdapat dua kategori, yaitu *mamak* dan kemenakan. *Mamak*, terlebih yang menjadi kepala kaum, diharapkan dapat mencarikan jalan keluar bila ada persoalan yang dialami oleh kemenakan dan anggota kerabatnya, seperti masalah pendidikan dan kesejahteraan mereka. Di lain pihak, kemenakan, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada *mamak*-nya.

Mamak merupakan pusat dan inti dari sistem kekerabatan matrilineal dan rumah gadang sebagai basis tempat tinggal anggota keluarga secara luas. Di dalam rumah gadang inilah eksistensi *mamak* akan diakui oleh semua anggota keluarga. Seorang *mamak* mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara dan pemberi kesejahteraan kepada anggota rumah gadang tersebut. Semua aktivitas yang berhubungan dengan rumah gadang akan selalu melibatkan *mamak*. Namun, peranan dan wewenang *mamak* dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini telah mengalami pergeseran seiring dengan berjalannya waktu.

Dalam *Tamu* dua kategori itu tergambarkan pada Ongga dan kerabat matrilinealnya yang

menjadi tamu Ongga yang datang silih berganti. Kedua kategori itu mempunyai wewenang, hak, dan kewajibannya masing-masing. Sebagai *mamak* yang dianggap pantas untuk menjadi kepala kaum Ongga harus dapat menyelesaikan semua persoalan yang diajukan kepadanya. Di pihak yang lain kaum kerabat Ongga menuntut Ongga untuk dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi mereka.

PENGARUH KONDISI POLITIK DAN SOSIAL BUDAYA

Tamu berlatar tahun 1990-an ketika Orde Baru memegang kekuasaan. Pada saat itu, pemerintahan bersifat sentralistis dan otoriter. Keamanan dan ketertiban tanpa gejolak untuk kestabilan dicanangkan yang mengacu pada otoritas dari pusat bagi seluruh wilayah Indonesia. Instruksi untuk menyeragamkan segala sesuatu dilakukan untuk persatuan dan kesatuan bangsa, seperti pakaian safari yang dipakai para pegawai negeri, anggota DPR, maupun pejabat-pejabat pemerintah. Pakaian safari merupakan simbol penguasa dan representasi dari pemerintah yang disegani dan ditakuti. Wisran menggambarkan kondisi masyarakat Minangkabau yang takut pada oknum berpakaian safari tersebut dalam kutipan berikut ini.

“Semua orang telah menunggu di depan surau. Dua orang berpakaian seragam tentara datang, diikuti beberapa petugas dari kedua jawatan sebagaimana yang dikatakan lurah, Teme diam-diam menghilang ke belakang surau. Tubuhnya menggigil melihat kedua tentara berpakaian lengkap. Japan pelan-pelan mundur dan berdiri menjauh. Dia berdiri di samping rumah orang tua Niyuih agar tidak langsung terlihat oleh petugas yang datang. Sedangkan Kicok kebingungan mencari-cari Japan dan Teme. Akhirnya diapun menghilang entah ke mana. Yang tetap tinggal hanyalah Subang dan Said serta beberapa lelaki.” (*Tamu*: 162-163)

Pemerintah Orde Baru juga gencar melaksanakan pembangunan terutama pembangunan fisik. Banyak fasilitas umum dibangun untuk

menunjukkan keberhasilan pemerintah. Namun, pembangunan fisik itu juga membawa akibat pada berbagai aspek kehidupan, seperti perampasan hak tanah milik orang lain. Dalam *Tamu* Wisran melukiskan keadaan itu ketika surau kaum Ongga akan digusur dan diganti dengan sebuah masjid. Akan tetapi, karena untuk membangun masjid memerlukan tanah yang lebih luas, pengurus Surau Batu yang baru dibentuk memaksa untuk mengambil tanah surau ditambah dengan tanah tempat rumah Ongga dan kerabatnya berdiri, seperti kutipan berikut ini.

“Salinan surat itu didapat Teme dari kantor kelurahan. Setelah Teme memberi tahu seluruh famili, mereka menjadi cemas. Sekiranya Surau Batu dibongkar dan di atasnya akan didirikan sebuah masjid besar, berarti habislah pemilikan atas tanah surau itu. Habislah sudah apa yang menjadi bagian dari sebuah kaum. Tidak mungkin pula mesjid besar itu hanya didirikan di atas tanah seluas tanah surau sekarang. Tentulah tanah sekitar surau juga terpakai. Enam buah rumah di sekitarnya harus pula dibongkar.” (*Tamu*: 158)

Tidak hanya masalah penggusuran tanah yang dimunculkan dalam *Tamu*. Pemalsuan ijazah dan penjualan gelar-gelar kesarjanaan yang marak dilakukan oleh anggota masyarakat merupakan manifestasi kondisi sosial budaya masyarakat. *Tamu* melukiskan keadaan ini ketika Burik mengatakan kepada Ongga tentang perselingkuhan istrinya dan tidak berani menceraikannya karena takut rahasianya memalsu ijazah istrinya diketahui orang lain (hal. 20). Kondisi masyarakat yang lain juga disorot oleh Wisran dalam *Tamu* tergambar pada kebobrokan proses peradilan yang penuh dengan rekayasa dan suap. *Tamu* menghadirkan keadaan itu ketika Ongga bingung saat emak Guguk memintanya untuk menyediakan uang tebusan Guguk supaya terbebas dari tuntutan hukum dengan sejumlah uang (hal. 16).

Latar sosial *Tamu* adalah masyarakat yang terpinggirkan, tergusur oleh desakan pembangunan. Mereka berasal dari struktur sosial

tingkat bawah yang tidak memiliki akses kekuasaan dan tidak dapat berperan dalam pemerintahan. Pendidikan mereka rata-rata rendah sehingga mereka tidak berhasil mendapatkan sosok kepala kaum ketika Ongga menolak jabatan itu. Mereka mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, petani, penjual bengkoang, dan buruh. Masyarakat yang digambarkan dalam *Tamu* adalah masyarakat yang secara ekonomi kurang sejahtera.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, status lelaki Minang adalah sebagai seorang *mamak* bagi anak-anak saudara perempuannya (kemenakan) yang di dalamnya termasuk adanya hak dan kewajiban yang harus dijalani. *Mamak* mempunyai kewajiban mengontrol dan memiliki wewenang atas wanita dan anak-anak dalam suatu kelompok keturunan (Marzali, 2004). Namun, wewenang itu telah mengalami pergeseran, antara lain disebabkan oleh faktor politik dan sosial.

Kebijakan pembangunan di segala bidang yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru telah membawa berbagai akibat pada perubahan struktur sosial di Minangkabau. Sertifikasi tanah atas nama seseorang untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah guna membangun fasilitas publik menyebabkan sering terjadi persengketaan antaranggota kaum. Hal itu terjadi karena sebagian besar tanah di Sumatra Barat berstatus tanah ulayat. Wisran melukiskan keadaan itu ketika terjadi perkelahian antara Mamo (*mamak*) dengan Guguk (kemenakan) yang menyebabkan Mamo meninggal dunia, seperti kutipan berikut ini.

“... Kengerian Ongga menghadapi persoalan kaumnya bermula sejak Mamo terbunuh. Peristiwa itu benar-benar menggoncangkan seluruh kampung. Setahu Ongga, belum pernah terjadi peristiwa pembunuhan yang begini menakutkan. Kalau selama ini terjadi pertengkaran dan caci maki sesama kaum, hanya terebatas sampai di situ saja. Tidak pernah berlanjut menjadi perkelahian yang membahayakan, apalagi sampai ada yang terbunuh.” (*Tamu*: 10)

Kutipan di atas menunjukkan hubungan antara *mamak* dengan kemenakan yang berubah. Guguk seharusnya mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada *mamak*-nya tetapi karena masalah tanah ulayat mereka berkelahi bahkan sampai terjadi pembunuhan. Begitu juga yang terjadi pada Ongga (kemenakan) dengan Aji Sirene dan Uyue Aji (*mamak*). Ongga berselisih dengan kedua *mamak*-nya juga karena rencana penjualan tanah ulayat milik kaum mereka.

Perselisihan di antara anggota kaum ini bertolak dari masalah yang mendasar dari kekerabatan matrilineal Minangkabau. Tanah merupakan harta kekayaan kaum yang paling pokok karena merupakan sumber kehidupan mereka. Selain itu, tanah merupakan identitas diri untuk menunjukkan asal usul seseorang sehingga orang akan dianggap kurang atau dipandang rendah dihadapan orang lain apabila tidak mengetahui asal usulnya (Navis, 1984: 157). Dengan demikian, persoalan tanah pusaka telah menyebabkan hubungan *mamak* dengan kemenakan menjadi renggang.

Salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah adalah dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintahan Desa. Undang-undang tersebut berisi pembentukan pemerintah desa yang dikepalai oleh seorang lurah di seluruh Indonesia. Ketetapan itu dibentuk untuk menyeragamkan struktur pemerintahan agar mudah dikontrol dari pusat. Sejak era tahun 1970-an pemerintah mempunyai dana yang harus disalurkan ke seluruh desa untuk melancarkan program pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk mempermudah proses penyaluran dan mengontrol bantuan tersebut perlu dibentuk struktur pemerintahan yang seragam.

Dengan lahirnya undang-undang tersebut, wilayah nagari yang merupakan wilayah terkecil dari kesatuan masyarakat adat di Sumatra Barat harus dipecah. Sebelum dipecah, di Sumatra Barat terdapat 543 nagari. Setelah undang-undang itu diberlakukan terdapat pembengkakan jumlah desa menjadi

3.138 unit yang kemudian disebut *orong* dan 406 kelurahan. Sebelumnya, *orong* adalah bagian dari wilayah nagari. Dengan demikian, jumlah bantuan dari pemerintah menjadi kurang lebih tujuh kali lipat dari sebelumnya.

Akan tetapi, pemekaran wilayah menimbulkan persoalan baru di Sumatra Barat. Kepala *orong* yang disebut lurah hanya dapat berfungsi di bidang pemerintahan saja, sedangkan di bidang adat masih dipegang oleh *penghulu* (pemimpin nagari) yang biasanya dijabat oleh salah seorang *mamak* di antara mereka. Di sini timbul dua kepemimpinan yang mengakibatkan krisis sosial pada masyarakat Minangkabau. Kewibawaan *ninik-mamak* dalam memimpin nagari menjadi merosot karena berbenturan dengan kepemimpinan formal yang dijabat oleh kepala desa. *Ninik-mamak* kehilangan otoritasnya untuk mengatur warga atau anggota kaumnya karena posisinya menjadi lemah. Wisran melukiskan keadaan itu pada episode ketika kaum Guci tidak mempunyai kesatuan pendapat saat surau mereka akan diambil alih pemerintah untuk dijadikan masjid. Tidak ada koordinasi dari kepala kaum (Ongga) dengan anggota kaum, bahkan terkesan mudah diadu domba di antara mereka oleh pengurus Surau Batu (hal. 162). Beralihnya fungsi surau menjadi masjid juga menjadi sebab bergesernya fungsi *mamak*. Karena masjid telah menjadi milik umum, *mamak* tidak lagi memiliki otoritas di surau dan kehilangan tempat untuk mendidik anak kemenakan yang menjadi tanggung jawabnya.

Faktor perubahan lingkungan sosial dapat dilihat dari jumlah anggota kaum yang semakin bertambah sementara tanah pertanian sebagai sumber ekonomi semakin sempit menyebabkan mudah terjadi konflik di antara anggota kaum. Tanah ulayat yang diambil pemerintah untuk pembangunan menyebabkan luasnya semakin berkurang. Keadaan ini mendorong keluarga inti untuk keluar dari rumah gadang dan memilih untuk tinggal di rumah sendiri. Dalam *Tamu* Wisran menggambarkan keadaan ini pada sosok Ongga yang tidak lagi tinggal di rumah gadang karena tanah tempat rumah

gadangnya berdiri telah tergusur (hal. 43 dan 44). Sebagai *mamak* sekaligus kepala kaum, Ongga harus menerima segala persoalan yang diajukan kaum kerabatnya di rumah gadangnya. Akan tetapi, persoalan penggusuran surau dan rumah yang belum selesai menyebabkan rumah gadang tidak nyaman lagi untuk ditinggali. Keadaan itu memaksa Ongga untuk tinggal di rumah istrinya. Di rumah istrinya itulah Ongga menerima kaum kerabatnya. Secara adat seharusnya keluarga Ongga akan datang ke rumah gadang mereka dan menerima mereka di rumah tersebut. Namun kini bukan ke rumah Ongga persoalan keluarga itu dibicarakan tetapi di rumah istrinya. Ongga telah membuat tradisi baru. Tradisi seorang *mamak* apalagi sebagai figur pemimpin, Ongga telah terbiasa tanpa merasa canggung membicarakan persoalan keluarga di rumah istri.

Merantau sebagai bagian dari sistem budaya Minangkabau ternyata telah membawa pengaruh pada pergeseran nilai. Pada keluarga Minang yang merantau, terbentuknya keluarga inti tentu tidak dapat dihindari lagi. Secara fisik, mereka akan jauh dari sanak saudaranya yang berada di kampung halamannya sehingga tanggung jawab terhadap kemenakan dan kerabatnya, baik secara moral maupun ekonomi menjadi berkurang. Sebagai *mamak*, mereka akan mengalami kesukaran untuk mengontrol keluarga maupun tanah pusakanya.

Merantau merupakan pilihan dan hal yang penting bagi orang Minang untuk meningkatkan harga diri supaya dihormati orang lain. Wisran melukiskan hal itu pada sosok Ongga yang ingin merantau untuk menghindari persoalan keluarga karena dengan merantau ia tidak secara langsung berada di dekat keluarga (hal. 8). Meskipun merantau tidak menghalangi seseorang untuk berkomunikasi, jarak suatu tempat akan mengurangi intensitas komunikasi secara fisik. Dampak selanjutnya adalah intensitas pertemuan antara *mamak* dengan kemenakan menjadi jarang dan akan mengurangi peran *mamak* pada kemenakan. Di

samping itu, peran *mamak* tergantikan oleh ayah karena dalam kehidupan keluarga inti; ayahlah yang berperanan untuk memimpin keluarga. Ayahlah yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Dengan sendirinya, kehadiran *mamak* kurang dibutuhkan lagi dalam keluarga inti karena di dalam rumah sudah ada orang tua atau ayah.

Di dalam nagari, keputusan untuk kepentingan masyarakat selalu melalui proses yang demokratis. Masyarakat memercayakan keputusan musyawarah itu pada tiga unsur pokok dalam masyarakat yang disebut dengan *Tigo Tungku Sajarangan* (tiga tungku sejarangan). Tiga unsur pokok dalam masyarakat tersebut terdiri atas *ninik mamak* yang mengurus masalah yang berhubungan dengan adat, alim ulama, dan cerdik pandai. Persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan kaum atau nagari selalu dibicarakan oleh tiga kelompok tersebut.

Untuk itu, pendidikan merupakan proses penting bagi siapa saja guna mencapai cita-cita, karena dengan pendidikan wawasan dan pengetahuan seseorang menjadi terbuka luas. Masyarakat Minangkabau memandang pendidikan sebagai suatu hal yang dapat mengangkat derajat hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka mendapat kedudukan yang istimewa di masyarakat.

Dalam *Tamu Wisran* menggambarkan Ongga sebagai sosok terpelajar yang mendapat status terhormat menjadi kepala kaum walaupun ditolaknya. Ia cerdas dan hanya ialah yang dipercaya untuk dapat menyelesaikan persoalan, baik persoalan antar-anggota kaum maupun yang berhubungan dengan orang di luar kaumnya. Wisran melukiskan kesulitan kaum Guci yang diwakili Said untuk memberi penjelasan pada Pengurus Surau Batu supaya surau itu tidak diambil alih (hal. 164). Said digambarkan sebagai sosok yang hanya dapat bergurau dan bermain sepakbola. Di sini kelihatan Ongga mendapatkan kedudukan yang istimewa di mata kaumnya karena ia

termasuk dalam golongan kaum cendekia, seperti kutipan berikut ini.

“.... Kepandaian Said yang dibanggakan selama ini hanya main sepakraga dan bola kaki. Orang-orang yang hanya pandai mempergunakan kaki, otaknya terletak pada ibu jari kakinya. Kalau mau merebut posisi Ongga, otak harus diletakkan di kepala.” (*Tamu*, hal. 160)

Pendidikan telah membawa mereka pada mobilitas vertikal. Banyak di antara mereka yang bekerja dan memiliki jabatan. Ada juga yang berwiraswasta dan berhasil dalam bidang jasa. Dalam hubungan *mamak* kemenakan, kemenakan yang lebih terpelajar dan memiliki pengetahuan yang lebih dari *mamak*-nya tentu telah mengubah pola hubungan mereka. Posisi *mamak* dalam sistem kekerabatan ini akan menjadi semakin lemah di hadapan kemenakan maupun kerabatnya. Gambaran itu terlukis dalam *Tamu* ketika Ongga berselisih dengan Aji Sirene dan Uyue Aji. Ongga dianggap lebih cerdas daripada kedua *mamak*-nya tersebut sehingga ketika Aji Sirene akan meminta ganti rugi atas penebusan tanah yang dibangun rumah gadang ibu Ongga; ia dapat memberikan argumentasi untuk menolak tindakan yang bertentangan dengan adat tersebut (hal. 42-43). Demikian juga ketika Uyue Aji telah memalsu tanda tangan Ongga dan saudara-saudaranya supaya dapat menjual tanah kaum. Dengan cerdas, Ongga meminta bantuan temannya yang bekerja di kantor notaris untuk menggagalkan usaha jual beli tanah tersebut (hal. 75). Di sini dapat dilihat bahwa kedua *mamak* Ongga tidak dapat meminta Ongga untuk mematuhi perintahnya.

SIMPULAN

Novel *Tamu* berlatar tahun 1990-an yang merupakan periode Orde Baru. Pemerintah Orde Baru telah membuat kebijakan-kebijakan yang sentralistis dan otoriter. Kebijakan itu membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan lain atas aturan-aturan pemerintah dan tidak dapat mengatur diri sendiri. Bantuan desa tidak sepenuhnya berhasil karena bantuan itu justru

menimbulkan dampak negatif pada tatanan masyarakat, khususnya di Minangkabau.

Undang-Undang Pemerintah No. 15/1975 dan Undang-Undang Pemerintah No. 5/ 1979 telah membuat kegoncangan dalam masyarakat karena telah memberi andil pada pergeseran sistem nilai di Minangkabau. Pandangan mereka terhadap keberadaan tanah ulayat berubah menyebabkan perselisihan dalam kehidupan suatu kaum sehingga hubungan *mamak* dengan kemenakan beserta seluruh kerabatnya menjadi longgar. Merantau, berkembangnya keluarga batih dan pendidikan, juga berperan dalam perubahan sistem nilai di Sumatra Barat ini.

Ketegangan-ketegangan yang dimunculkan oleh Wisran dalam *Tamu* menunjukkan adanya goncangan dalam tatanan sosial dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Suasana yang terlukis itu tidak lepas dari situasi yang terjadi dalam kenyataan masyarakat Minangkabau yang sedang mengalami pergeseran nilai sehingga timbul kegoncangan dalam masyarakat. *Tamu* adalah gagasan dan perasaan Wisran yang mewakili kelompok sosial tempat Wisran hidup dalam lingkungannya. Dengan begitu, terdapat kesejajaran antara novel *Tamu* dengan keadaan yang sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

DAFTAR RUJUKAN

- Abrams, M.H. 1981. *A Glossary of Literary Term*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Elizabeth dan Toni Burns. 1973. *Sociology of Literature and Drama*. Baltimore: Penguin Books.
- Goldmann, Lucien. 1981. *Method in the Sociology of Literatur*. Oxford: Basil Blackwell.
- Hadi, Wisran. 1996. *Tamu*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Marzali. 2004. "Dapatkah Matrilineal Bertahan Hidup di Kota Metropolitan" dalam *Minang*, Jurnal Adat Dan Budaya Minangkabau. Edisi Ke Dua. Vol. 02/ Maret - Mei, 2004.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Terkenbang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta. PT Tempriint.
- Teeuw. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

- Wellek, Rene dan Austin Warren. 1993. *Teori Kesusasteraan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Wolf, Janet. 1981. *The Sosial Production of Art*. New York: New York University Press.
- Yunus, Umar. 1986. *Sosiologi Sastera; Persoalan Teori dan Metode*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.